



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governancedan clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping juga karena adanya pengaruh globalisasi. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Paradigma baru di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diarahkan oleh otonomi daerah menggeser peran pemerintah dari *power* kepada *empowerment*. Paradigma ini mengarahkan peran aparatur pemerintah kepada posisi yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat secara profesional.

Salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pewujudan *good government* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dimaksud adalah dalam konteks (1) kinerja sesuai dengan Tupoksi, dan (2) keuangan sesuai dengan dokumen anggaran yang telah disusun diawal tahun. Akuntabilitas pemerintahan yang dipercaya oleh publik dan stakeholder akan membangun pemerintah yang kuat dan berdaya saing tinggi. Pemerintahan yang kuat dan berdaya saing tinggi adalah kunci keberhasilan dalam persaingan dewasa ini.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik. Kecamatan Panyileukan selaku unsur pembantu pimpinan. dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Panyileukan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum. azas tertib penyelenggaraan negara. azas kepentingan umum. azas keterbukaan. azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Panyileukan Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja. realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Gambaran Umum Kecamatan Panyileukan

Kecamatan Panyileukan merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung yang secara de jure terbentuk melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pamekaran dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung. tetapi secara de facto berjalan setelah diresmikannya wilayah kerja Kecamatan Panyileukan oleh Walikota Bandung pada tanggal 20 Maret 2007 dengan batas wilayah dan jumlah Kelurahan di Kecamatan sebagai berikut:

• Utara	Kecamatan Cibiru dan Kecamatan Ujung Berung
• Selatan	Kecamatan Gedebage
• Barat	Kecamatan Cinambo
• Timur	Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



Pembagian Wilayah Kecamatan Panyileukan

No.	KELURAHAN	JUMLAH	
		RW	RT
1.	Cipadung Kulon	11	52
2.	Cipadung Wetan	6	19
3.	Cipadung Kidul	14	78
4.	Mekarmulya	6	36
Jumlah		37	185

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Panyileukan Tahun 2017

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota / Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 185 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah.

Kecamatan Panyileukan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 tentang (SOTK SKPD). Kecamatan Panyileukan mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Panyileukan mempunyai fungsi :

1. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
2. Pelayanan publik; dan
3. Pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan Panyileukan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh aparatur dibawahnya sesuai struktur organisasinya :

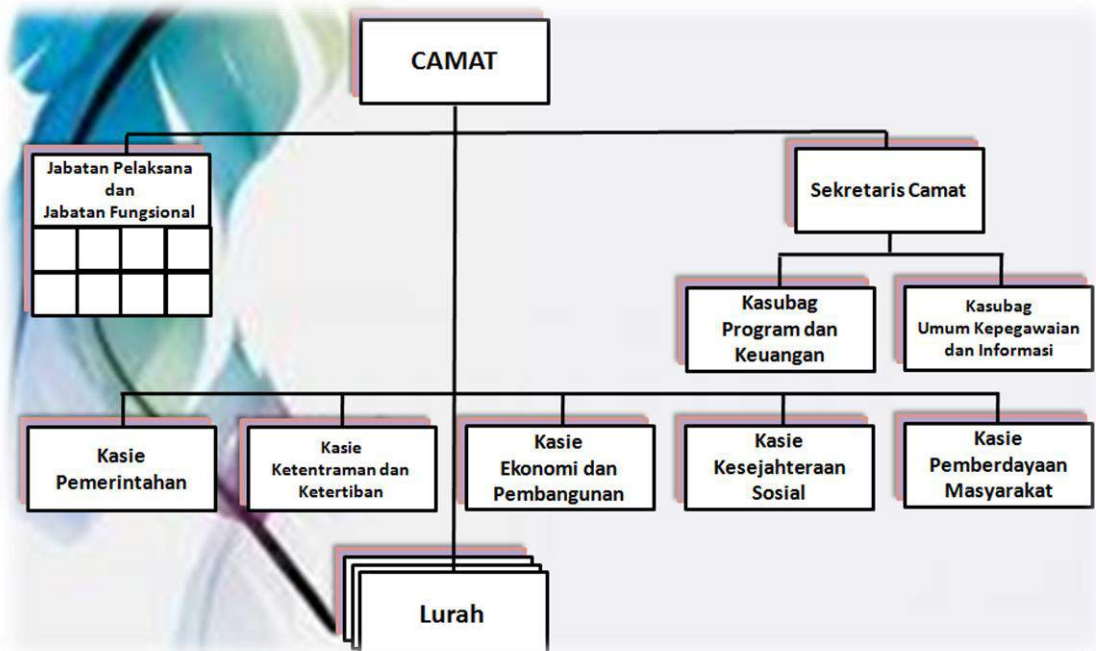


LKIP 2018

Kec. Panyileukan



STRUKTUR KECAMATAN KOTA BANDUNG TAHUN 2018



1.4. Isu Strategis

Pemerintah Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung pada tahun 2014 - 2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima, belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada Kecamatan;
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya;
4. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen;
5. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis.



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



Tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Panyileukan dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Panyileukan. sebagai berikut:

1. Kelurahan yang telah melaksanakan tertib administrasi Kelurahan sebesar 80 %;
2. Ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebesar 70 %;
3. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
4. Belum optimalnya Perencanaan Strategis Tingkat SKPD;
5. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008;
6. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
7. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan;
8. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Panyileukan. sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Program dan Kegiatan Kecamatan dan Kelurahan kepada Pemerintah Kota Bandung;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan.

1.5. Landasan Hukum

LKIP Kecamatan Panyileukan Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih. Bebas Korupsi. Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



LKIP 2018

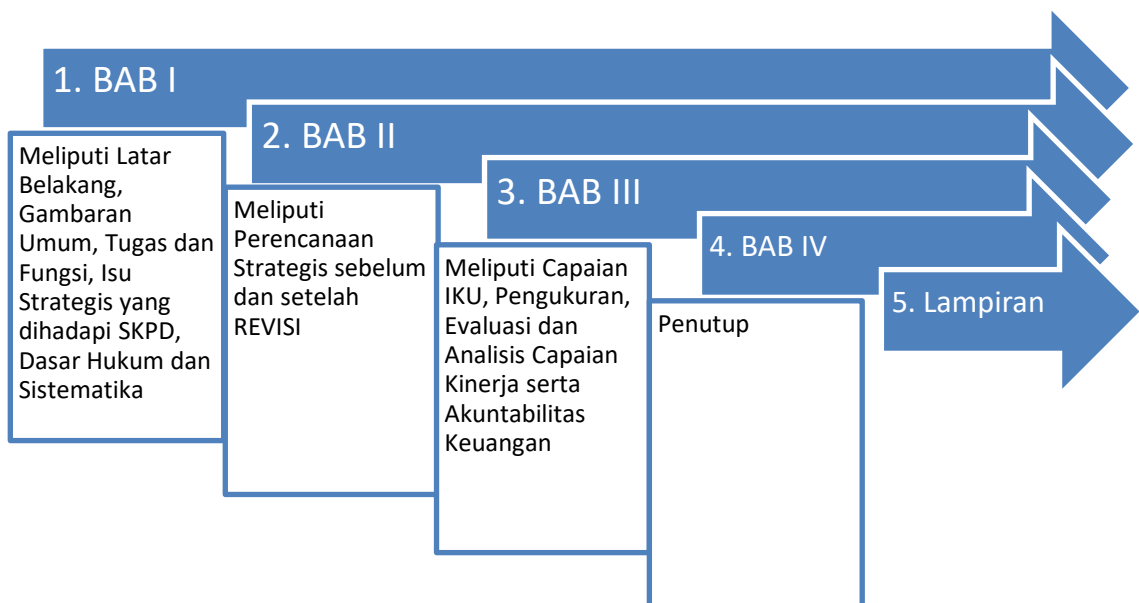
Kec. Panyileukan



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara REVISI Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.

1.6. Sistematika

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2017 adalah sebagai berikut:





LKIP 2018

Kec. Panyileukan



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1. Tujuan dan Sasaran

Rencana Strategis Kecamatan Panyileukan Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi RPJMD 2013-2018 yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan. dalam hal ini Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Panyileukan Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Panyileukan Kota Bandung Nomor 050/56-Kec.PnylkTahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya. dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD 2013-2018 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018.



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



Penyusunan Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013 - 2018 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD. Forum SKPD. sehingga Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dan *stakeholder*.

Selanjutnya. Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panyileukan Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi RPJMD 2013-2018 serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis sesuai *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017* pada lampiran halaman 397 sehingga tujuan disesuaikan dengan tugas dan fungsi dibentuknya SKPD tersebut dalam mendukung ketercapaian visi dan misi RPJMD 2013-2018. Dimana Visi dan misi RPJMD 2013-2018 sebagai berikut :

Visi :

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL. NYAMAN. DAN SEJAHTERA”

Misi :

1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang. pembangunan infrastruktur. dan fasilitas publik yang berkelanjutan (*sustainable*) dan nyaman.



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani.
3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2013 - 2018 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan REVISI terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan REVISI dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan REVISI terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil REVISI tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Panyileukan 2018.



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



Tabel 2.1.1

Tujuan. Sasaran. Indikator Dan Target Kinerja sebelum revisi dan setelah revisi
Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2018

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	SEBELUM REVISI		SETELAH REVISI						
				INDIKATOR SASARAN	SATU-AN	INDIKATOR SASARAN	SATU-AN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
								1	2	3	4	5
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	75	80	82.5	80.5	82.86
						Persentase Keluhan / pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	%	100	100	100		
						Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI	Nilai	825	850	850		
						Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	60	95	96		
						Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu	%	60	95	96		
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Rata-rata Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	Kategori	Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik	%	25	75	100		
						Persentase RW Juara	%	20	50	60		
						Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	%	60	70	75		



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



		-	-	-			Rasio Anggota Linmas	Rasio	1 : 0.7	1:1	1:1		
				Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	-	-	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%				75	85
2.	Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Panyileukan		Nilai AKIP Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	51	60	60		
							Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100		
							Tertib administrasi barang /asset daerah	%					



LKIP 2018 **Kec. Panyileukan**



2.1.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panyileukan ditetapkan melalui Keputusan Camat Panyileukan Nomor : 050/20.2-Kec.Pnylk Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung.

Bersamaan dengan revisi rencana strategis Kecamatan juga dilakukan revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Hanya ada dua indikator kinerja yang dimasukkan ke Indikator Kinerja Utama antara lain : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Tingkat Pemberdayaan Lembaga karena merupakan unsur penunjang dan merupakan tugas pokok dan fungsi SKPD di Kecamatan.

Uraian Indikator Kinerja Utama Kecamatan hasil sebelum dan setelah Revisi beserta penjelasannya dapat dilihat pada tabel 2.1.2.



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



Tabel 2.1.2

Indikator Kinerja Utama. Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Hasil REVISI Kecamatan Panyileukan Kota Bandung

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	SEBELUM REVISI		SETELAH REVISI							
				INDIKATOR KINERJA	SATU-AN	INDIKATOR KINERJA	SATU-AN	ALASAN	TARGET PADA TAHUNAN				
									2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan	75	80	82.5	80.5	82.86
						Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	%	Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan	100	100	100		
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Rata-rata Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	Kategori	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan	60	95	96		
						Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu	%	Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan	60	95	96		
			Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik	%	Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan	25	75	100					



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



						Persentase RW Juara	%	Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan serta Rencana Aksi Walikota Bandung	20	50	60		
						Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	%	Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan	65	70	75		
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	-	-	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan				75	85
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan	Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI	Angka								
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Rasio Anggota Linmas	Rasio								
2	Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Panyileukan	Nilai AKIP Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai								
				Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	%								

BUKAN IKU



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik. sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2013 - 2018. dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018. dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018. dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018. Kecamatan Panyileukan Kota Bandung telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Revisi
Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82.86
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	85

Dalam mengantisipasi ketercapaian kinerja yang telah diperjanjikan perlu adanya progres atau perkembangan ketercapaian indikator per-triwulan sehingga perlu dibuat KPI (Key Performance Indikator) sebagai alat ukur yang mencerminkan progres pencapaian kinerja sehingga untuk mencapai tujuannya yang dapat dijadikan pegangan dan dilaporkan dalam LKIP Triwulanan.



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan. badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Kecamatan Panyileukan Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Panyileukan Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara REVISI atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017 - 2018 maupun Renja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut. pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program. sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program. sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara REVISI atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing. sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	> 100%	Melebihi/ Melampaui Target
2.	= 100%	Sesuai Target
3.	< 100%	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini. Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013 - 2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut. pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program. sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi RPJMD Pemerintah Kota Bandung. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Camat Panyileukan Nomor : 050/20.2-Kec.Pnylk Tahun 2018. telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



- ✚ Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- ✚ Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah. maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.



sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Panyileukan Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Panyileukan Nomor : 050/07-Kec.Pnylk Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas. Kecamatan

Panyileukan Kota Bandung juga melakukan REVISI terhadap Indikator Kinerja Utama. dalam melakukan REVISI dengan memperhatikan capaian kinerja. permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Panyileukan Kota Bandung tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



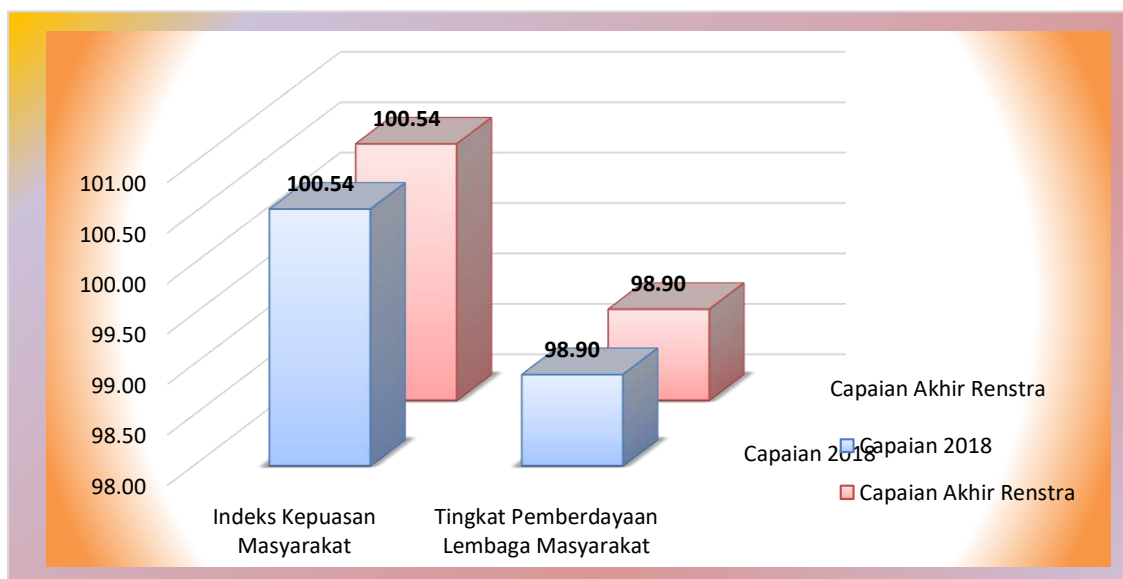
Tabel 3.2.1

Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2018

No	IKU / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Renstra 2018	
						Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82.86	83.31	100.54	82.86	100.54
2	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	%	85	84.07	98.90	85	98.90
Rata-Rata					99.72		99.72

Grafik 3.2.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panyileukan
Kota Bandung Tahun 2018





LKIP 2018

Kec. Panyileukan



Dari tabel dan grafik tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian IKU sebagai berikut :

Melebihi / Melampaui Target	Sesuai Target	Tidak Mencapai Target
sebanyak 1 (satu) indikator atau sebesar 50 % ditunjukkan pada indikator Indeks Kepuasan masyarakat dengan capaian 100,54%	Tidak ada (n/a)	sebanyak 1 (satu) indikator atau sebesar 50 % ditunjukkan pada indikator Tingkat Pemembrdayaan Lembaga Kemasyarakatan dengan capaian 98,90%

3.3. Pengukuran. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Panyileukan Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013 - 2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi RPJMD Kota Bandung Tahun 2013 - 2018 sebanyak 2 (dua) sasaran.

Tahun 2018 adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan. dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung adalah sebagai berikut:



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



Tabel 3.3.1

Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2018

No	IKU / Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	Target 2018	Realisasi	Capaian	Akhir Renstra 2018	
							Target	Capaian
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	102.69	82.86	83.31	100.54	82.86	100.54
2	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	%	120.36	85	84.07	98.90	85	98.90

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3.2

Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)
1.	Melebihi/ melampaui target	1 (satu) Indikator sasaran/ 50.00%
2.	Sesuai target	0 (nol) Indikator sasaran/ 00.00%
3.	Tidak mencapai target	1 (satu) Indikator sasaran/ 50.00%

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel. sebagai berikut:

Dari 2 Indikator Sasaran diatas. pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut :



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



Tabel 3.3.3

Pencapaian Target Sasaran

Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2018

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	TINGKAT PENCAPAIAN					
			MELAMPAUI TARGET (>100%)		SESUAI TARGET (=100%)		BELUM MENCAPAI TARGET (>100%)	
			JML	%	JML	%	JML	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan	1	1	100	0	0	0	0
2.	Sasaran 2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	1	0	0	0	0	1	100

Dari 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja. pencapaian kinerja Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3.4

Pencapaian Kinerja Sasaran

Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2017

NO	KATEGORI	JUMLAH INDIKATOR	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Sasaran1		
1.	Melebihi/ melampaui target	1	100.00%
2.	Sesuai target	0	0 %
3.	Tidak mencapai target	0	0 %
B.	Sasaran2		
1.	Melebihi/ melampaui target	0	0 %
2.	Sesuai target	0	0 %
3.	Tidak mencapai target	1	100.00%



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 sasaran dan 2 indikator kinerja dari Misi RPJMD Kota Bandung, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Revisi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung tahun 2013 - 2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



Sasaran 1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.5

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2018			Realisasi Tahun 2017	Akhir Renstra Tahun 2018	
			Target	Realisasi	Capaian %		Target	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	82.86	83.31	100.54	82.67	82.86	100.54

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat.

Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat

Capaian kinerja nyata indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 82.86 dari target sebesar 83.31 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018. sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.54 % atau melampaui target yang diperjanjikan.



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



Tabel 3.3.6

Nilai Unsur Pelayanan (Indeks Pelayanan)
Kecamatan Panyileukan Tahun 2018

NO	UNSUR PELAYANAN	REKAP TAHUN 2018	
		NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN	NILAI INDEKS UNIT PELAYANAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persyaratan pelayanan	3.29	0.365
2	Prosedur Pelayanan	3.29	0.365
3	Waktu Pelayanan	3.19	0.354
4	Biaya/tarif Pelayanan	3.88	0.431
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3.25	0.361
6	Kompetensi petugas pelayanan	3.30	0.366
7	Prilaku petugas pelayanan	3.38	0.375
8	Penanganan Pengaduan Pelayanan	3.19	0.355
9	Sarana dan prasarana	3.37	0.374
Jumlah		30.14	3.346
IKM Unit Pelayanan			83.31
Mutu Pelayanan			B
Kinerja Unit Pelayanan			Baik

Sumber data : Seksi Pelayanan Kecamatan Panyileukan dan kelurahan

Nilai Unsur Pelayanan atau Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh 5 unit kerja Kecamatan Panyileukan masing masing terhadap 150 responden dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai Indeks Unit Pelayanan = Nilai Unsur Pelayanan (NRR) x penimbang (0.111)

Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks Unit Pelayanan x Nilai Dasar (25)



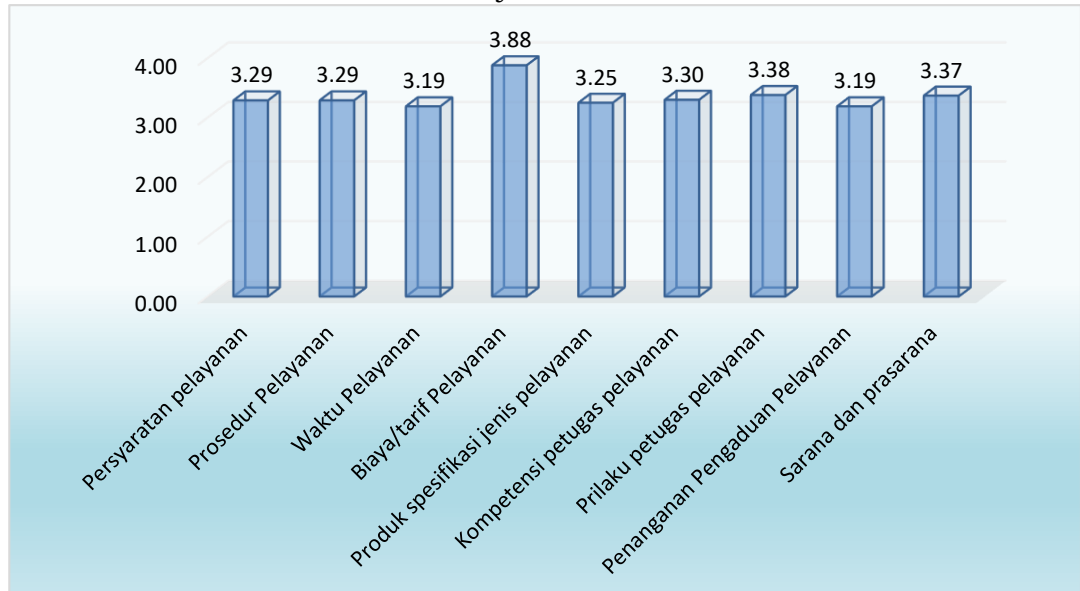
LKIP 2018

Kec. Panyileukan



Grafik. 3.3.7

Nilai Unsur Pelayanan (Indeks Pelayanan)
Kecamatan Panyileukan Tahun 2018



Dari tabel Unsur Pelayanan dan grafik diatas dapat kita lihat data yang capaiannya yang tinggi hingga capaiannya yang rendah hal ini mencerminkan mutu pelayanan yang telah dilaksanakan di Kecamatan panyileukan.

Data tertinggi pada tabel dan grafik diatas terletak pada unsur biaya / tarif pelayanan yang mendapat nilai 3.88. hal ini menandakan bahwa masyarakat yang menggunakan pelayanan di Kecamatan Panyileukan telah mengetahui bahwa pelayanan yang dilakukan secara gratis sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditentukan.

Data terendah pada tabel dan grafik diatas terletak pada unsur penanganan pelayanan pengaduan yang mendapat nilai 3.19. Bila kita melihat kedalam lampiran untuk penanganan pengaduan pelayanan yang menduduki urutan paling kecil nilainya kelurahan cipadung kidul nilainya sebesar 3.13 hal ini disebabkan kesalahan dalam melakukan rekapitulasi seharusnya pada penempatan sarana dan prasarana dan Kecamatan Panyileukan dengan nilai sebesar 3.18. hal ini disebabkan



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



oleh pencetakan KTP yang waktu belum bisa dipastikan sesuai SOP dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhinya untuk Kecepatan Pelayanan terkait dengan jumlah stock keping KTP yang ada untuk di kecamatan karena terbatasnya pengedropan keping KTP dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung sehingga penanganan pengaduan terkesan lambat.

Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 Kecamatan Panyileukan telah melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan sebesar 82.67 dari target 80.50 atau capaian sebesar 102.69 berarti kinerja nyata pada tahun 2017 mengalami penurunan Indeks kepuasan masyarakat sebesar 2.15.

Tabel 3.3.8

Nilai Unsur Pelayanan (Indeks Pelayanan)

Kecamatan Panyileukan Tahun 2018 dan Tahun 2017

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN TAHUN 2018	NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN TAHUN 2017	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1	Prosedur Pelayanan	3.29	3.32	-0.03
2	Persyaratan pelayanan	3.29	3.30	-0.01
3	Kejelasan Petugas Pelayanan	-	3.19	
4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	-	3.25	
5	Tanggung Jawa Petugas Pelayanan	-	3.23	
6	Kemampuan Petugas Pelayanan (kompetensi petugas)	3.30	3.23	0.77
7	Kecepatan Pelayanan (waktu pelayanan)	3.19	3.15	0.04
8	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	-	3.24	
9	Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan (prilaku petugas)	3.38	3.30	0.08
10	Kewajaran Biaya Pelayanan (biaya/tarif pelayanan)	-	3.93	



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



11	Kepastian Biaya Pelayanan	3.88	3.91	-0.03
12	Kepastian Jadwal pelayanan	-	3.14	
13	Kenyamanan Lingkungan	-	3.17	
14	Keamanan Pelayanan	-	3.22	
	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3.25	-	
	Penanganan pengaduan pelayanan	319	-	
	Sarana dan Prasarana	3.37	-	
IKM Unit Pelayanan		83.31	82.67	
Mutu Pelayanan		B	B	
Kinerja Unit Pelayanan		Baik	Baik	

Sumber data : Seksi Pelayanan Kecamatan Panyileukan dan kelurahan

Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat capaian kinerja indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat** sebagai berikut :

Pada tahun 2018 dilihat dari nilai unsur prosedur dan kepastian biaya pelayanan mengalami penurunan nilai sebesar 0.03 dan untuk rata rata ikm kecamatan mengalami kenaikan serta perbandingan tidak semua unsur. hal ini disebabkan antara lain jumlah quisioner jumlahnya yang berbeda dan adanya perbedaan materi penilaian.

Bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan dari target nilai akhir renstra 81.5 dan capaian 82.67 maka capaian kinerjanya mencapai 101.43 %. sehingga perlu adanya reuiu untuk target indeks kepuasan masyarakat baik pada Rencana Strategi (Renstra) maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta IKU Kecamatan Panyileukan sebagai perencanaan untuk tahun 2018.

Bila capaian indeks kepuasan masyarakat tahun 2018 dibandingkan dengan OPD lain (Kecamatan) lain yang memiliki tugas dan fungsi yang sama maka :



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



Tabel 3.3.9

Data Perbandingan

Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Instansi lain (Kecamatan lain)

Tahun 2018

NO	NAMA KECAMATAN	TARGET	IKM	Capaian (%)	Rank IKM	Rank Capaian
1	ANDIR	81.30	82.54	101.53	24	12
2	ANTAPANI	80.50	82.76	102.81	22	7
3	ARCAMANIK	83.50	83.96	100.55	14	18
4	ASTANAANYAR	82.00	83.84	102.24	15	8
5	BABAKAN CIPARAY	82.00	82.14	100.17	26	24
6	BANDUNG KIDUL	82.80	88.61	107.02	2	2
7	BANDUNG KULON	82.15	82.20	100.06	25	27
8	BANDUNG WETAN	81.35	83.75	102.95	16	5
9	BATUNUNGGAL	81.00	81.78	100.96	29	15
10	BOJONGLOA KALER	82.80	83.53	100.88	18	16
11	BOJONGLOA KIDUL	82.00	82.66	100.80	23	17
12	BUAH BATU	84.50	84.59	100.11	7	26
13	CIBEUNYING KALER	84.50	86.28	102.11	4	9
14	CIBEUNYING KIDUL	83.00	84.33	101.60	9	11
15	CIBIRU	82.00	82.03	100.04	27	28
16	CICENDO	81.05	83.68	103.24	17	4
17	CIDADAP	81.75	81.97	100.27	28	22
18	CINAMBO	82.00	84.31	102.82	10	6
19	COBLONG	84.00	84.09	100.11	12	25
20	GEDE BAGE	80.50	89.79	111.54	1	1
21	KIARACONDONG	85.00	86.71	102.01	3	10
22	LENGKONG	83.00	84.14	101.37	11	13
23	MANDALAJATI	84.50	84.53	100.04	8	29
24	PANYILEUKAN	82.86	83.31	100.54	19	19
25	RANCASARI	82.80	83.03	100.28	21	21



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



26	REGOL	79.45	83.29	104.83	20	3
27	SUKAJADI	85.75	85.00	99.13	6	30
28	SUMUR BANDUNG	85.00	85.18	100.21	5	23
29	SUKASARI	79.45	79.70	100.31	30	20
30	UJUNG BERUNG	83.00	84.04	101.25	13	14
RATA - RATA			83.92			

Capaian Pengukuran laporan monev IKU Kecamatan

Bila dibandingkan dengan Indeks Pelayanan 30 (tiga puluh) Kecamatan lainnya IKM Kecamatan Panyileukan berada dibawah rata-rata capaian IKM 30 (tiga puluh) Kecamatan. capaian IKM Kecamatan Panyileukan (83.31) dibawah rata-rata IKM 30 (tiga puluh) Kecamatan sebesar 83.92.

Bila dibandingkan dengan hasil pengukuran nilai Indeks Pelayanan 30 (tiga puluh) Kecamatan lainnya. IKM hasil pengukuran Kecamatan Panyileukan 83.31 berada diposisi ke 19 dan dibandingkan dengan rangking tahun 2017 yang menduduki rangkin ke 15 dari 30 kecamatan maka mengalami penurunan rangking 4 poin. bila capaian (%) kecamatan panyileukan dengan nilai 100.54% dibandingkan rata-rata capaian IKM 30 (tiga puluh) Kecamatan maka capaian (%) kecamatan panyileukan menduduki urutan ke 19 pula. capaian IKM Kecamatan Panyileukan (83.31) dibawah rata-rata IKM 30 (tiga puluh) Kecamatan menduduki urutan ke 19 dengan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan di Kota Bandung 83.92

Keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator kinerja Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

1. Tersedianya tenaga pelayanan non PNS yang dapat mendukung peningkatan pelayanan
2. Tersedianya aplikasi mesin antrian yang dilengkapi dengan pengukuran IKM secara sistem di Kecamatan



LKIP 2018 **Kec. Panyileukan**



Faktor Penghambat :

1. Capaian pelayanan indeks kepuasan yang belum maksimal dan akurat
2. Kinerja struktural yang masih perlu dimaksimalkan untuk mendokrak pencapaian IKM

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan masyarakat berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas. maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi/rencana aksi pada tahun berikut adalah :

1. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat akan dilakukan dengan menggunakan sistem yang ada dimesin antrian dengan harapan akan lebih akurat;
2. Kegiatan untuk struktural yang didukung anggaran yang ada di DPA dimaksimalkan dengan melakukan penerapan output yang jelas dan terukur pada kegiatan PPTK Struktural sehingga untuk PPTK harus memenuhi target yang telah ditetapkan dan didukung dengan target capaian IKI dari semua unsur ASN.



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



Sasaran 2

Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.10

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2018			Realisasi Tahun 2017	Akhir Renstra Tahun 2018	
			Target	Realisasi	Capaian %		Target	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	85	84.07	98.90	90.27	85	98.90

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.

Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Capaian kinerja nyata Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan adalah sebesar 84.07 dari target sebesar 85 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018. sehingga persentase capaian kerjanya adalah 98.90 % atau belum mencapai target yang diperjanjikan.



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



Tabel 3.3.11

Nilai Unsur Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
Kecamatan Panyileukan Tahun 2018

NO	KELURAHAN	NILAI UNSUR TINGKAT PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN (%)			
		RW JUARA	SISKAMLING AKTIF	LKK AKTIF	RATA - RATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Cipadung Kulon	100.00	63.64	100.00	87.88
2	Cipadung Wetan	100.00	83.33	66.67	83.33
3	Cipadung Kidul	78.57	50.00	100.00	76.19
4	Mekarmulya	66.67	100	100.00	88.89
RATA RATA PER UNSUR		86.31	74.24	91.67	84.07
Kinerja Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan					

Sumber data : Kelurahan se- Kecamatan Panyileukan

Nilai Unsur Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan diperoleh dari pengukuran pemberdayaan masyarakat yang dilakukan 4 kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan.

Nilai tingkat lembaga kemasyarakatan = (% RW JUARA + % SISKAMLING AKTIF + % LKK AKTIF) dibagi 3

% RW JUARA = RW yang memenuhi kriteria (1 dari 5 pengelolaan sampah dan 5 dari 21 roadmap wali Kota) dibagi Jumlah RW di kelurahan tersebut

% SISKAMLING AKTIF = Jumlah RW yang emenuhi 5 kriteria siskamling aktif dibagi Jumlah RW di Kelurahan tersebut

% LKK AKTIF = Jumlah LKK (PKK. Karang Taruna dan LPM) yang memenuhi 4 kriteria LKK Aktif dibagi 3



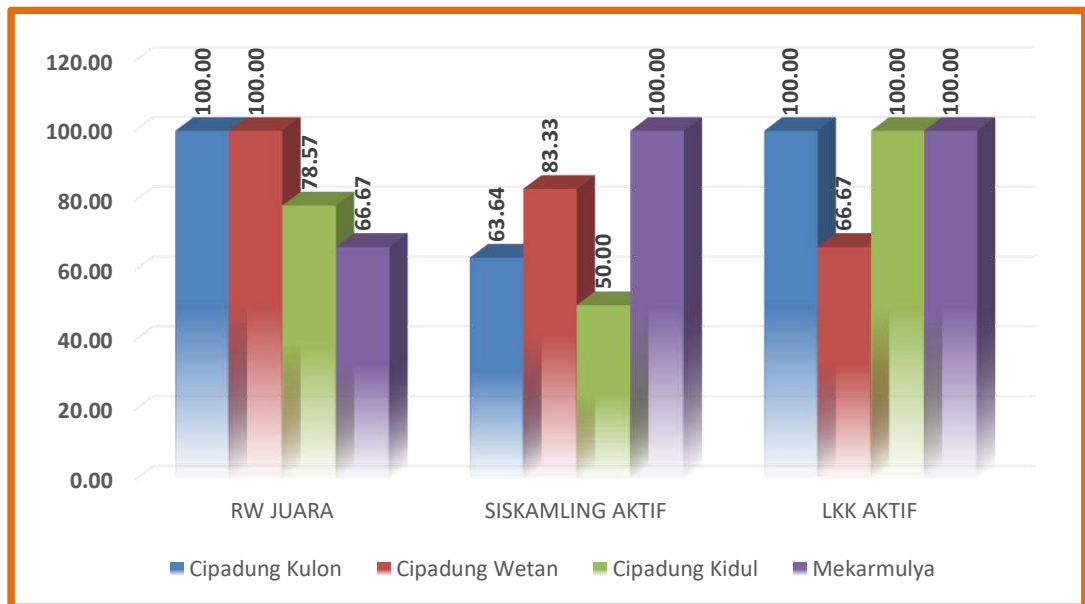
LKIP 2018

Kec. Panyileukan



Grafik. 3.3.6

Nilai Unsur Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
Kecamatan Panyileukan Tahun 2018



Dari tabel dan grafik Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan grafik diatas dapat kita lihat data yang capaiannya yang tertinggi hingga capaiannya yang terendah hal ini mencerminkan bervariasi kinerja yang telah dilaksanakan kelurahan di Kecamatan panyileukan.

Data tertinggi pada tabel dan grafik diatas pada Kelurahan Mekarmulya dimana 3 unsur penilaian memiliki nilai 88.89 % dalam hal ini Kelurahan perlu mempertahankan capaian capaian yang telah diraih.

Data terendah pada tabel dan grafik diatas pada Kelurahan Cipadung Kidul dimana dari 3 unsur penilaian yang menduduki nilai terendah pada kelurahan Cipadung Kidul yang mencapai 76.19 sehingga perlu adanya peningkatan capaiannya.

Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 atau tahun sebelumnya capaian Kecamatan Panyileukan sebesar 90.27 % dan 2018 capaian sebesar 84.07 % sehingga mengalami penurunan sebesar 5.80%.



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



Tabel 3.3.12

Nilai Unsur Pelayanan (Indeks Pelayanan)

Kecamatan Panyileukan Tahun 2018 dan Tahun 2017

NO	Kelurahan / Kecamatan	Capaian Tingkat Pemberdayaan Masyarakat TAHUN 2018	Capaian Tingkat Pemberdayaan Masyarakat TAHUN 2017	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1	Kelurahan Cipadung kulon	87.88	100	-12.12
2	Kelurahan Cipadung Wetan	83.33	88.89	-4.41
3	Kelurahan Cipadung Kidul	76.19	83.33	-7.14
4	Kelurahan Mekarmulya	88.89	88.89	0
5	Capaian se-Kecamatan	84.07	90.27	-6.2

Sumber data : Kelurahan di Kecamatan Panyileukan

Bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan dari target nilai akhir renstra 85 dan capaian 84.07 maka capaian kinerjanya mencapai 98.90 %. sehingga perlu adanya penurunan untuk target Tingkat pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan baik pada Rencana Strategi (Renstra) maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta IKU Kecamatan Panyileukan sebagai perencanaan untuk tahun 2018-2023.

Bila capaian tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tahun 2018 dibandingkan dengan OPD lain (Kecamatan) lain yang memiliki tugas dan fungsi yang sama maka :



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



Tabel 3.3.13

Data Perbandingan Tingkat Pemberdayaan Lembaga Masyarakat
Tahun 2018

NO	NAMA SKPD / UNIT KERJA	UNSUR PENILAIAN JUARA			
		Target	Realisasi	Capaian %	Rang King
1	ANDIR	75.00	79.40	105.87	18
2	ANTAPANI	77.50	88.49	114.18	7
3	ARCAMANIK	85.00	84.59	99.52	29
4	ASTANAANYAR	90.00	98.63	109.59	13
5	BABAKAN CIPARAY	78.00	95.08	121.90	4
6	BANDUNG KIDUL	85.00	85.09	100.11	27
7	BANDUNG KULON	75.00	85.00	113.33	9
8	BANDUNG WETAN	77.00	78.70	102.21	24
9	BATUNUNGGAL	78.00	82.61	105.91	17
10	BOJONGLOA KALER	85.00	85.09	100.11	27
11	BOJONGLOA KIDUL	75.50	89.56	118.62	5
12	BUAH BATU	75.00	77.58	103.44	20
13	CIBEUNYING KALER	80.00	92.36	115.45	6
14	CIBEUNYING KIDUL	75.00	82.76	110.35	12
15	CIBIRU	85.00	87.30	102.71	22
16	CICENDO	72.21	89.09	123.38	3
17	CIDADAP	75.00	76.91	102.55	23
18	CINAMBO	79.55	87.10	109.49	14
19	COBLONG	75.00	114.30	152.40	1
20	GEDE BAGE	75.00	98.50	131.33	2
21	KIARACONDONG	80.00	88.69	110.86	11
22	LENGKONG	76.00	86.00	113.16	10



LKIP 2018

Kec. Panyileukan

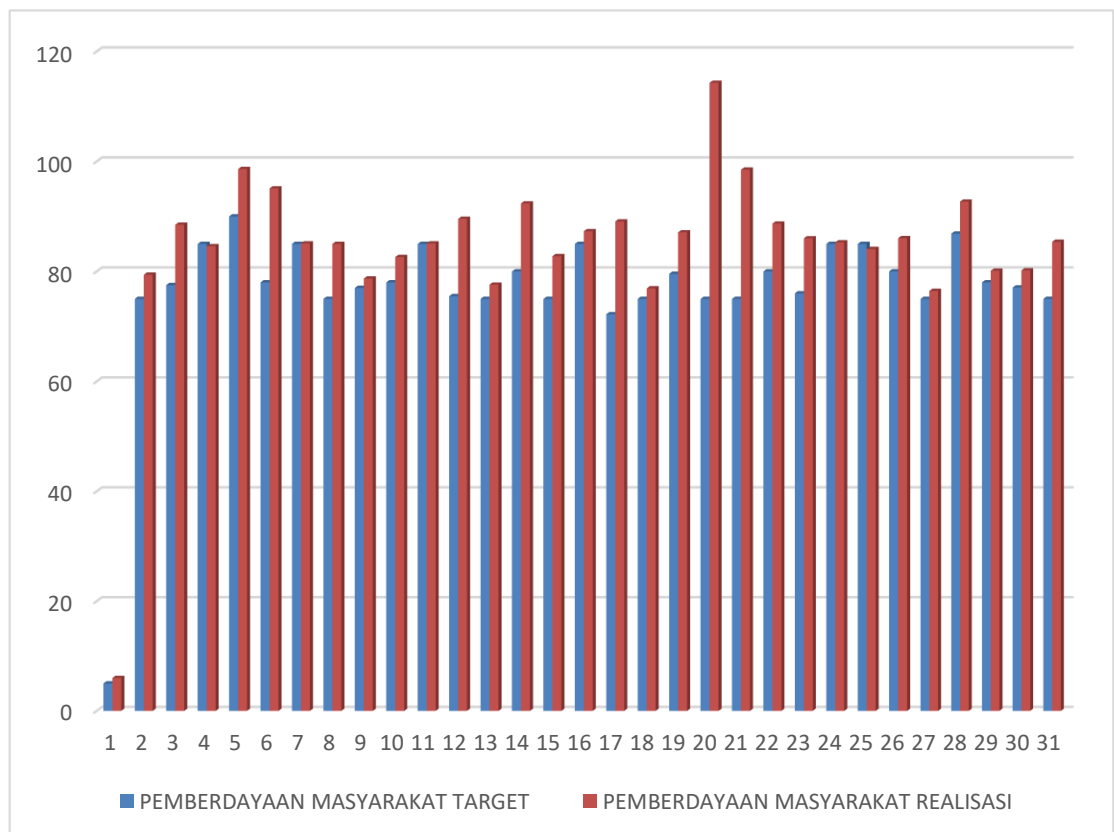


23	MANDALAJATI	85.00	85.28	100.33	26
24	PANYILEUKAN	85.00	84.07	98.91	30
25	RANCASARI	80.00	86.04	107.55	15
26	REGOL	75.00	76.45	101.93	25
27	SUKAJADI	86.87	92.69	106.70	16
28	SUMUR BANDUNG	78.00	80.12	102.72	21
29	SUKASARI	77.08	80.20	104.05	19
30	UJUNG BERUNG	75.00	85.38	113.84	8

Bagian ORPAD

Grafik 3.3.2

Perbandingan Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
Tahun 2018





LKIP 2018 **Kec. Panyileukan**



Bila melihat tabel dan grafik untuk capaian tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dibandingkan dengan kecamatan lain bervariasi sehingga dari tabel dapat dilihat menduduki ranking 30. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya :

- Banyaknya RW dan kelurahan
- Perencanaan kegiatan

Keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator kinerja Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

1. Perencanaan sudah terdapat dalam sub kegiatan

Faktor Penghambat :

1. Tidak jadinya perubahan Anggaran
2. Lebih memantapkan perencanaan sehingga meminimalisir kesalahan

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan dan Realisasi sub kegiatan lingkup RW dan Lingkup LKK berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas. maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi/rencana aksi pada tahun berikut adalah :

1. Melakukan pemantapan kembali terkait perencanaan
2. Melakukan pemantauan kembali terkait penyerapan anggaran



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran

Capaian kinerja sasaran di Kecamatan Panyileukan didukung oleh Program

No.	PROGRAM	URAIAN/ PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (program penunjang)	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah tersedianya (jasa komunikasi. sumber daya air. kebutuhan listrik dan internet). jasa kebersihan kantor. jasa perbaikan peralatan kerja. Alat Tulis Kantor (ATK). barang cetakan dan penggandaan. peralatan dan perlengkapan kantor. Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. makanan dan minuman dan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (program penunjang)	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya Gedung Kantor yang memadai. Kendaran dinas operasional yang memadai. Terpeliharanya gedung kantor dan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur(program penunjang)	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya Pakaian Dinas Lengkap beserta atribut. Tersedianya pakaian batik dan pakaian olahraga
4.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Output program beserta kegiatan didalamnya antara lain Simpul Space Kecamatan. 30 kampung Kreatif Wisata. Creative District Project. (termasuk pembinaan KUKM. Profil Potensi Ekonomi). Rumah Sehat. Satu Taman Satu Komunitas. Satu Kampung Satu Taman. . Pasukan Gorong Gorong (termasuk MUSRENBANG). Penanganan Pasar Tumpah. Satpol PP Kecamatan. Forum PKL. Media Brosur Tertib PKL. Pembinaan



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



		LINMAS. SATWANKAR) SATGASUS PKL. Balai RW/ Markas Karang Taruna. Safari Aspirasi Walikota Dengan Warga Level RW Setiap RW Setiap Minggu. Honor RW RT (termasuk pembinaan RW RT). (termasuk operasional Pelayanan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan)
5	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Output program beserta kegiatan didalamnya antara lain Forum Jaga Budaya di Kelurahan. Forum RW Juara. Forum Karang Taruna Juara. Forum LPM Juara. Kampung Berkebun. Bedah Rumah Warga Miskin (termasuk Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan. Profil masalah Sosial). Rumah Sehat. Kampung Berkebun. Bike Sharing. Jum'at Bersepeda. Gerakan <i>Zero Waste Home</i> . Bank Sampah. Motor Sampah Kelurahan. Supermarket Sampah. Tempat Sampah RW/ Jalan Utama. Sejuta Biopori/ Sumur Resapan. Mesin Pencacah Sampah. Pengajuan Mobil Pembersih. Bendungan Sampah. <i>Septic Tank Communal</i> . Hemat Air dan Daur Ulang. <i>River Green Wall</i> . Gerakan Atap Hijau. Gerakan Pagar Hijau. Gerakan Satu Rumah Satu Pohon. Gerakan Bandung <i>Green N Clean</i> . Gerakan Bandung Bersih. Jalan Caang Baranang. Media Kampanye Bandung Bebas. Banjir.Perkerasan paving Kotak. Gerakan Membangun Tanpa Menggusur di Kampung Kumuh. Kebinamargaan



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



Tabel 3.3.14

Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran
Kecamatan Panyileukan
Tahun 2018

No	SASARAN	SKPD / URAIAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROG RAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN REALISASI		%	Nama PPTK
				Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Urusan Wajib					
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1,014,924,10 2.00	906,794,290. 00	89.35	
		Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa bulanan komunikasi. air dan listrik	148,084,800. 00	118,365,750. 00	79.93	Desy Sumarti.S.TP
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	29,509,210.0 0	9,885,000.00	33.50	Desy Sumarti.S.TP
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor bulanan				Desy Sumarti.S.TP
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	199,153,585. 00	197,435,000. 00	99.14	Desy Sumarti.S.TP
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Paket penyediaan ATK	36,080,000.0 0	29,570,000.0 0	81.96	Desy Sumarti.S.TP
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	29,074,108.0 0	28,913,500.0 0	99.45	Desy Sumarti.S.TP
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan	59,551,910.0 0	50,868,550.0 0	85.42	Desy Sumarti.S.TP
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	2,323,750.00	2,045,800.00	88.04	Desy Sumarti.S.TP
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga				Desy Sumarti.S.TP
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah jenis bahan bacaan	1,660,289.00	0.00	0.00	Desy Sumarti.S.TP



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



	undangan					
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman bulanan	15,566,650.00	10,809,800.00	69.44	Desy Sumarti.S.TP
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	7,963,000.00	7,946,000.00	99.79	Desy Sumarti.S.TP
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah jasa tenaga pendukung adminis trasi perkantor an / teknis perkantoran	35,566,800.00	33,047,500.00	92.92	Desy Sumarti.S.TP
	Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa bulanan komunikasi. air dan listrik	36,292,080.00	23,737,850.00	65.41	Tarsujono.S. Sos.
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	10,615,000.00	8,628,000.00	81.28	Tarsujono.S. Sos.
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Paket penyediaan ATK	13,226,380.00	13,183,600.00	99.68	Tarsujono.S. Sos.
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	13,204,013.00		12,414,600.00	Tarsujono.S. Sos.
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan	12,194,724.00	12,066,000.00	98.94	Tarsujono.S. Sos.
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	1,479,000.00	1,421,300.00	96.10	Tarsujono.S. Sos.
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan	1,836,000.00	1,604,000.00	87.36	Tarsujono.S. Sos.
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman bulanan	22,572,000.00	20,320,500.00	90.03	Tarsujono.S. Sos.
	Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa bulanan komunikasi. air dan listrik	10,980,000.00	10,778,500.00	98.16	Asri Destiawati
	Penyediaan Jasa	Jumlah jasa	2,600,000.00	2,600,000.00	100.0	Asri



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



	Perbaikan Peralatan Kerja	perbaikan peralatan kerja			0	Destiawati
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Paket penyediaan ATK	7,895,304.00	7,894,650.00	99.99	Asri Destiawati
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	4,835,000.00	4,815,000.00	99.59	Asri Destiawati
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan	5,727,900.00	5,602,750.00	97.82	Asri Destiawati
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor bulanan	600,000.00	600,000.00	100.00	Asri Destiawati
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	4,240,000.00	4,216,750.00	99.45	Asri Destiawati
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan	1,416,000.00	1,135,000.00	80.16	Asri Destiawati
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman bulanan	12,340,000.00	12,311,550.00	99.77	Asri Destiawati
	Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa bulanan komunikasi. air dan listrik	27,654,000.00	6,024,100.00	21.78	Ana. S.Sos. M.Si
	Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	6,325,000.00	511,000.00	8.08	Ana. S.Sos. M.Si
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Paket penyediaan ATK	11,829,756.00	11,465,900.00	96.92	Ana. S.Sos. M.Si
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	6,001,600.00	2,088,600.00	34.80	Ana. S.Sos. M.Si
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan	3,539,250.00	945,000.00	26.70	Ana. S.Sos. M.Si
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	1,590,710.00	1,589,500.00	99.92	Ana. S.Sos. M.Si
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan	858,000.00	0.00	0.00	Ana. S.Sos. M.Si



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman bulanan	5,236,000.00	1,518,000.00	28.99	Ana. S.Sos. M.Si
	Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa bulanan komunikasi. air dan listrik	33,939,954.00	25,750,500.00	75.87	Meli Susanti. A.Ks
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	10,470,000.00	7,700,000.00	73.54	Meli Susanti. A.Ks
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Paket penyediaan ATK	14,944,656.00	12,537,400.00	83.89	Meli Susanti. A.Ks
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	7,582,547.00	7,418,000.00	97.83	Meli Susanti. A.Ks
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan	4,723,290.00	4,419,000.00	93.56	Meli Susanti. A.Ks
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	3,208,920.00	3,200,000.00	99.72	Meli Susanti. A.Ks
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	2,429,460.00	1,681,000.00	69.19	Meli Susanti. A.Ks
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan	1,416,000.00	1,380,000.00	97.46	Meli Susanti. A.Ks
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman bulanan	14,088,800.00	11,426,000.00	81.10	Meli Susanti. A.Ks
	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>					
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah 5 unit Gedung Kantor terpelihara	100,410,530.00	99,115,500.00	98.71	Desy Sumarti.S.TP
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah 37 unit kendaraan dinas / operasional terpelihara	2,299,999,905.00	1,902,434,600.00	82.71	Desy Sumarti.S.TP
	Pemeliharaan rutin/berkala	Jumlah 1 unit Gedung Kantor	28,533,607.00	25,091,500.00	87.94	Tarsujono.S. Sos.



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



	gedung kantor	terpelihara				
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah 1 unit Gedung Kantor terpelihara	3,038,750.00	3,000,000.00	98.72	Asri Destiawati
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah 1 unit Gedung Kantor terpelihara	89,372,800.00	88,586,267.00	99.12	Ana. S.Sos. M.Si
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah 1 unit Gedung Kantor terpelihara	100,410,530.00	99,115,500.00	98.71	Meli Susanti. A.Ks
	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1 inut rehab gedung kantor	2,299,999,905.00	1,902,434,600.00	82.71	Meli Susanti. A.Ks
	<i>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</i>		191,664,000.00	139,601,000.00	72.84	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	111,045,000.00	65,373,000.00	58.87	Desy Sumarti.S.TP
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari tertentu	80,619,000.00	74,228,000.00	92.07	Desy Sumarti.S.TP
	<i>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</i>					
	Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lap Hasil Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	9,886,600.00	9,636,000.00	97.47	Mimin Aminah.SE.
	Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Kelurahan	229,086,499.00	214,968,110.00	93.84	Herliani.AP. S.Sos
	Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	229,086,499.00	214,968,110.00	93.84	Mimin Aminah.SE.
	Peningkatan	Jumlah				Sanusi.S.Sos.



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



	Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Laporan Hasil Fasilitas Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	922,458,321.00	627,878,500.00	68.07	
	Fasilitas Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Peningkatan Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	229,459,200.00	225,112,600.00	98.11	Dra. Hj. Aniek Febriani
	Fasilitas pemberdayaan masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	240,018,800.00	239,143,300.00	99.64	Dra. Miftah
	Fasilitas Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan	8,360,000.00	8,360,000.00	100.00	Endang Rudatin
	Fasilitas Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Kelurahan	159,852,000.00	159,852,000.00	100.00	Anita Mulyati.S.IP
	Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Peningkatan Infrastruktur Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	497,273,530.00	488,779,100.00	98.29	Endang Rudatin
	Fasilitas Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Peningkatan Kualitas Pemerintahan Kecamatan	351,345,500.00	349,142,000.00	99.37	Wawan Gunawan. S.Sos



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



			dan Kelurahan				
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		2,695,000.00	2,310,000.00	85.71	Wawan Gunawan. S.Sos
	Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan		3,960,000.00	3,300,000.00	83.33	Yayan Syurya Mulyana.ST.
	Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Kelurahan		92,438,500.00	85,664,400.00	92.67	Rahmat Kartolo
	Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		391,137,500.00	390,262,500.00	99.78	Yayan Syurya Mulyana.ST.
	Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan		241,341,340.00	240,759,700.00	99.76	Sofyan
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		5,215,000.00	4,870,000.00	93.38	Sofyan
	Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Kelurahan		147,725,000.00	106,390,000.00	72.02	Tata Tarwan
	Peningkatan	Jumlah					Asep



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Laporan Hasil Fasilitas Peningkatan Infrastruktur Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	429,649,200.00	429,649,200.00	100.00	Supriatna. S.AP
	Fasilitas Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Peningkatan Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	455,850,000.00	451,404,000.00	99.02	Yeti Yuniati
	Fasilitas Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Jumlah Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	360,000.00	345,000.00	95.83	Yeti Yuniati
	Fasilitas Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	770,000.00	700,000.00	90.91	Evy Rohaeti. S.E.
	Fasilitas Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Kelurahan	93,431,250.00	84,700,000.00	90.65	Mansur Supandi
	Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Peningkatan Infrastruktur Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	404,968,620.00	398,751,200.00	98.46	Evy Rohaeti. S.E.
	Fasilitas Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Peningkatan Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	333,632,500.00	328,284,000.00	98.40	Neni Rosihlawati.B Sc.
	Fasilitas Peningkatan	Jumlah Kegiatan	5,185,500.00	5,140,000.00	99.12	Neni Rosihlawati.B



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



	Pelayanan Kepada Masyarakat	Fasilitas Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat				Sc.	
JUMLAH REALISASI SASARAN I							
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan					
		Fasilitas pemberdayaan lingkup RW	Jumlah Sub Kegiatan	1.004.929.222,26	987.357.250	98,25	Wawan Gunawan. S.Sos
		Fasilitas Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah Sub Kegiatan	99.847.000	98.559.500	98,71	Anita Mulyati.S.IP
		Fasilitas Pemberdayaan lingkup karang taruna	Jumlah Sub Kegiatan	99.711.697	97.760.700	98,04	Anita Mulyati.S.IP
		Fasilitas Pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah Sub Kegiatan	99.901.500	98.094.700	98,19	Anita Mulyati.S.IP
		Fasilitas pemberdayaan lingkup RW	Jumlah Sub Kegiatan	543.158.018,86	533.193.060,00	98,17	Sofyan
		Fasilitas Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah Sub Kegiatan	99.995.834	98.372.200	98,38	Rahmat Kartolo
		Fasilitas Pemberdayaan lingkup karang taruna	Jumlah Sub Kegiatan	100.000.000	98.940.400	98,94	Rahmat Kartolo
		Fasilitas Pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah Sub Kegiatan	99.990.000	99.153.100	99,16	Yayan Syurya Mulyana.ST.
		Fasilitas pemberdayaan lingkup RW	Jumlah Sub Kegiatan	1.276.744.075,51	1.212.873.490,00	95,00	Asep Supriatna. S.AP
		Fasilitas Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah Sub Kegiatan	99.996.220,00	92.916.200,00	92,92	Tata Tarwan
		Fasilitas Pemberdayaan lingkup karang taruna	Jumlah Sub Kegiatan	99.999.900,00	98.584.100,00	98,58	Tata Tarwan
		Fasilitas Pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah Sub Kegiatan	99.976.100,00	98.269.400,00	98,29	Tata Tarwan
		Fasilitas pemberdayaan lingkup RW	Jumlah Sub Kegiatan	542.990.387,23	528.063.900,00	97,25	Neni Rosihlawati.B Sc.
		Fasilitas Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah Sub Kegiatan	99.994.500,00	97.841.000,00	97,85	Mansur Supandi
Fasilitas Pemberdayaan lingkup karang taruna	Jumlah Sub Kegiatan	99.996.500,00	98.817.700,00	98,82	Mansur Supandi		



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



	Fasilitas Pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah Sub Kegiatan	99.996.000,00	99.188.000,00	99,19	Mansur Supandi
	JUMLAH REALISASI SASARAN II		4.567.226.954,86	4.437.984.700,00	97,17	
	TOTAL		14.792.083.895	13.523.079.001	97,01	

1.4. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan untuk sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan adalah sebesar **Rp. 14.792.083.895.00** dan terealisasi sebesar **Rp. 13.523.079.001.00** atau dengan serapan dana APBD untuk sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan mencapai **97.01%**. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:6

Tabel 3.3.15

Rencana dan Realisasi Anggaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2018

No.	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	10.224.856.939	9.085.094.301	88,85 %
2	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	4.567.226.955.86	4.437.984.700	97.17 %
	Jumlah	14.792.083.894.86	13.523.079.001	97.01 %



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



Tabel 3.3.16

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Kecamatan Rancasari Tahun 2018

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Sasaran 1,	1			
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100,54 %	9.085.094.301	88,85 %
2	Sesuai Target	-	-		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		
B.	Sasaran2,	1			
1	Melebihi/Melampaui Target	-	-	4.437.984.700	97.17 %
2	Sesuai Target	-	-		
3	Tidak Mencapai Target	1	98,90 %		
			99,72 %		97.01 %

Anggaran yang telah dikeluarkan efektif untuk pencapaian sasaran

Tabel 3.3.17

Tingkat Efisiensi Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tahun 2018

No	Sasaran	% Kinerja	% Capaian Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=3-4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik Kecamatan Panyileukan	100,54	88,85 %	11,69
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	98,90	97.17 %	1,73
Rata - Rata		99,72	97.01	2,71



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian sasaran kinerja.

Dengan rata-rata persentase realisasi anggaran terhadap pagu indikatif Renstra sebesar 4.95% maka secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan **efektif** terhadap capaian kinerja misi organisasi.

1.5. Informasi Tambahan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Kecamatan Panyileukan Kota Bandung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai. prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut :

1. Prestasi Tingkat Nasional

No.	Prestasi	Juara	Tahun
1.	Merupakan salah satu kecamatan unggulan sebagai Kecamatan Sehat	Juara I	2015

2. Prestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat

No.	Prestasi	Juara	Tahun
1.	Lomba Kesrak pelaksanaan LBS (Kel. Cipadung Kidul)	Juara I	2015
2	Lomba PHBS Tk. Propinsi Jawa Barat	Juara I	2017
3	Lomba PIK-R Tk. Propinsi Jawa Barat	Juara I	2017
4	Lomba BKR Tk. Propinsi Jawa Barat	Juara IVI	2017

3. Prestasi Tingkat Kota Bandung

No.	Prestasi	Juara	Tahun
-----	----------	-------	-------



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



1.	Keluarga Harmonis (kelurahan Cipadung Kidul)	Juara IV	2015
2.	Akseptor Lestari 15 Tahun Harmonis (kelurahan Cipadung Kulon)	Juara IV	2015
3.	Juara Vocal Group PKK	Juara I	2015
4.	Sebagai Role Model Project Standar Pelayanan Versi Ombudsman		2015
5.	Sebagai Role Model Project Reformasi Birokrasi versi kemenpan RB		2015
6.	Sebagai Role Model Project Analisis Jabatan versi BKN. kemenpan RB dan Kemendagri		2015
7.	Camat Juara Tahun 2015	Juara I	2015
8.	Stand Pameran Gelar PIPPK Thn 2015	Juara favorit	2015
9.	Penerima KNPI Award kategori Kec dgn Reformasi Birokrasi Terbaik	Juara I	2015
10.	Lomba Pusat Layanan Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak (RW 10 Cpd Kidul)	Juara I	2015
11.	Lomba Kesrak KB-Kes Tk.Kota Bandung	Juara I	2017
12.	Lomba Menhias Kue Tk. Kota Bandung	Juara I	2017
13.	Lomba Daur Ulang Sampah Tk Kota	Juara I	2017
14.	Lomba Adiwiyata Tk Kota Bandung	Juara I	2017
15.	Lomba Dokter kecil Tk. Kota Bandung	Juara I	2017
16.	Lomba Keluarga Sakinah	Juara Harapan I	2017
17.	Lomba Tarumpah Panjang dalam Rangka ORTHRAD Tk Kota Bandung	Juara IV	2017
18.	Lomba Sekolah Sehat Tk SD	Juara IVI	2017
19.	Lomba Tafsir Bahasa Arab (Putri)	Juara I	2017
20.	Lomba M2IQ (Putra)	Juara IV	2017



LKIP 2018

Kec. Panyileukan



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2018. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2018 Kecamatan Panyileukan Kota Bandung menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,54% atau interpretasi memuaskan
- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 98,90 atau interpretasi memuaskan

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 85 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi **Memuaskan**. Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2017 pada



LKIP 2018 Kec. Panyileukan



Belanja Langsung (BL) sebesar **Rp. 13.523.079.001.00** sedangkan realisasi anggaran atau dengan serapan dana APBD Anggaran Belanja Langsung (BL) mencapai 97,01%.

Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung 2014 - 2018 menetapkan sebanyak 2(dua) sasaran dengan 2(dua) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan pada tahun 2018 sampai dengan Tahun 2018 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018. dengan rincian pencapaian sasaran renstra sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan capaian 100,54%
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan capaian 98,90%

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Panyileukan Kota Bandung ini. diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Panyileukan Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, 18 Januari 2019

CAMAT PANYILEUKAN,
KECAMATAN
PANYILEUKAN
Drs. H. HAMDANI, MM.
Pembina Tk.I, IV/b
NIP.19670806 198910 1 001